
Belajar dari Fenomena *Mawālī*

Hairul Puadi¹ Nur Qomari²

Dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

¹ Email: hairulpuadi@alqolam.ac.id

² Email: nurqomari@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received Aug 2018

Accepted Sep 2018

Available Online Nov 2018

Keywords:

Mawālī,

opposition,

Arab supremacy,

Umayyad Regime

ABSTRACT

Mawālī was born from the oppression and discrimination of the Umayyad Regime. They emerged as a new political force and as an opposition which eventually helped to overthrow the Umayyad Dynasty. This is a further result of the Bani Umayyad's political policies in upholding Arab supremacy over the non-Arab Muslim community. Realized or not, sharp segregation and separation in terms of social, economic up to worship (ritual) gave birth to a new phenomenon in the world of the political arena of the Umayyad regime. Arab supremacy can indeed be enforced, but greater movement and strength in their bodies are ready to tear them down at any time.

The oppression, discrimination and treatment as a second class society under the domination of the Arab Muslims they received not only made them hate the Umayyad regime but moreover they were anti-Arab; trying to oppose the Arabism system.

PENDAHULUAN

Setiap manusia yang terindas dan diperlakukan secara diskriminatif selalu akan mengadakan gerakan-gerakan yang berusaha untuk melepaskan diri dari ketertindasan tersebut.

Baik gerakan itu berupa gerakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi (*underground*), baik kecil riaknya yang menggerogoti secara perlahan tetapi pasti maupun berupa gelombang besar yang menghancurkan dan meruntuhkan. Upaya melepaskan diri dari ketertindasan, diskriminasi dan keinginan untuk menegakkan identitas diri ini akan selalu terjadi di setiap zaman, tempat dan semua peradaban.

Salah satu ciri proses peralihan kekuasaan (*transference of power*) pada tradisi kedinastian Islam dalam sejarah peradabannya adalah pengambilalihan kekuasaan yang didasari oleh ketidakpuasan atas kebijakan-kebijakan penguasa dan yang lain adalah karena perilaku diskriminatif, intimidasi dan penindasan kepada rakyatnya. Hal ini merupakan kenyataan sejarah yang telah digoreskan oleh dinasti-dinasti Islam terdahulu yang harus diterima, tanpa mengenyampingkan dinasti-dinasti lain yang diperoleh dengan cara damai dan demokratis.

Yang terakhir dari dua ciri di atas akan melahirkan kelompok-kelompok oposisi dengan gerakan-gerakan yang terorganisir untuk menggulingkan penguasa yang tiran atau, paling tidak, melepaskan diri dari segala jenis penindasan dan tekanan (*pressure*) yang mereka terima. Inilah yang terjadi pada sejarah peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah (661-750 M) telah lahir, disadari atau tidak, sebuah gerakan oposisi besar dari kelompok masyarakat tertindas yang hidup di bawah bayang-bayang penguasa yang tiran. Mereka disebut kelompok *mawālī*, sebuah gelar dengan konotasi masyarakat kelas dua yang berada di bawah seorang patron.

Makalah ini akan membahas seluk beluk *mawālī*, bentuk tekanan yang mereka terima dan bentuk-bentuk gerakan mereka. Topik ini diangkat guna melihat ketiraniaan dan ketidakadilan pemerintah Bani Umayyah, perlakuan diskriminatif mereka terhadap rakyatnya. Lebih jauh lagi adalah untuk membuktikan bahwa orang yang hidup di bawah tekanan dan ketertindasan selalu mengadakan pemberontakan menentang sang penindas atau paling tidak berusaha melepaskan diri dari ketertindasan tersebut.

SANG OPOSISI TELAH LAHIR

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa salah satu kebijakan politik yang diterapkan selama berlangsungnya rezim Dinasti Umayyah adalah adanya pemisahan dan pemi-lahan yang tajam antara masyarakat muslim Arab dengan masyarakat muslim non-Arab.

Yang disebut terakhir ini adalah orang-orang dari negeri taklukan yang kemudian masuk Islam dan berbaur dengan masyarakat muslim Arab, meskipun dalam kehidupan sosial politiknya tetap diwarnai oleh kesenjangan yang tajam dan jelas. Dapat dicatat di sini, hanya pada masa pemerintahan Umar II (717-720 M) kelompok muslim non-Arab ini sedikit agak mencair sebab 'Umar memandang bahwa dominasi sebuah etnis atas etnis yang lain merupakan suatu sikap yang anakronistik.¹

Barangkali inilah kesalahan terbesar dari pemerintahan Dinasti Umayyah. Kelangsungan pemerintahan mereka digerogeti dari dalam. Supremasi Arab memang dapat berdiri tegak pada masa *the golden age*-nya. Namun, di balik kebesaran nama itu, justru lahir bibit sang oposisi yang setiap saat dapat menggulingkan mereka.

Masyarakat muslim non-Arab ini, dalam sejarah dikenal dengan sebutan *mawālī* (bentuk jamak dari *maulā*) yang berarti orang yang dilindungi (disokong).² Istilah ini tidak mencakup non-muslim, *dzimmī*.³ Secara prinsip, mereka tidak berada pada posisi yang independen dalam pengertian bahwa sebagai muslim mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan *sosial* masyarakat, *lahum mā lanā wa 'alainā mā 'alaihim*. Mereka memiliki kebebasan yang sama yang tidak boleh dikekang dan dibatasi oleh siapapun, kapanpun dan di manapun. Namun, pada praktiknya, status mereka disamakan dengan budak dan *client*. Kedua penamaan tersebut sama hina dan kejinya.⁴ Mereka dipandang sebagai warga negara kelas dua yang hidup di bawah ketertindasan dan ketidakadilan.

Kaum *mawālī* ini merupakan kelompok masyarakat yang bukan asli keturunan Arab. Mereka meliputi warga Persia, Armenis, Mesir, Berber dan masyarakat lain yang masuk Islam. Menurut K. Ali, dalam bukunya *A Study of Islamic History*, salah satu faktor yang

¹ Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam (A History of Islamic Studies)*, trans. Gufon A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 63

² E.J. Brill, *First Encyclopedia of Islam*, Vol. VI, (Leiden: E.J. Brill, 1987), hlm. 876

³ Akbar S. Ali, *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*, (New York: Routledge, 1991), hlm. 40. Ia menambahkan bahwa term *mawali* ini menunjukkan kelompok masyarakat muslim yang tidak berasal dari keturunan Arab.

⁴ *Ibid.* lihat juga W. Montgomery Watt, *the Majesty That was Islam*, (London: Sidgwick & Jackson, 1994), hlm. 54. Ia memandang bahwa penamaan *mawali* (*client*) ini bertentangan dengan al-Qur'an tentang persamaan (egalitarianism) dan persaudaraan (*Islamic Brotherhood*). Lihat juga Akbar S. Ali, *Discovering...*, hlm. 40. Menurutnya persamaan ini tidak pernah diberikan kepada *mawālī* selama pemerintahan Bani Umayyah. Baca juga Bernard Lewis, *the Arab in History*, (New York: Harper&Row, 1967), hlm. 70. Menurutnya persamaan yang seharusnya ada pada kenyatannya tidak pernah sepenuhnya diberikan oleh aristokrasi Arab, baik dalam hal sosial maupun ekonomi.

mendorong mereka untuk masuk Islam adalah karena, pada masa Khalifah Abdul Malik (685-705 M), umat Islam hanya wajib membayar zakat dan dibebaskan dari beban pajak. Hal ini mendorong warga non-Arab untuk meninggalkan kampung-kampung mereka menuju kota dan kemudian memeluk Islam sebagai agama baru mereka.⁵

Secara yuridis, menurut Montgomery Watt, *mawālī* terbagi pada tiga tingkatan, yaitu *maulā rahīm*, *maulā 'itq* dan *maulā al-'ahd*. Seseorang menjadi *mawālī* disebabkan oleh pertalian keluarga, pembebasan dari perbudakan dan karena perjanjian. Yang pertama, demikian Watt, karena adanya hubungan pertalian baik matrilineal maupun patrilineal, yang kedua karena dibebaskan dari perbudakan yang tertangkap dalam peperangan dan yang terakhir karena adanya perjanjian sukarela yang menetapkan dirinya menjadi *client* bagi wali patronnya.⁶

Mereka menempati lebih dari separuh penduduk Kufah, memonopoli sektor kerajinan, perdagangan dan perniagaan. Suku Persia merupakan kelompok mayoritas dari mereka yang masuk ke Kufah sebagai tawanan perang. Selanjutnya mereka menjadi *client* bagi orang muslim Arab. Mereka, menurut RA. Nicholson, berada pada posisi yang ambigu (*zwitterstellung*), apakah selalu akan menjadi budak yang selalu tergantung dan membutuhkan perlindungan dan proteksi dari patronnya, atau membentuk kelompok sendiri dalam kondisi damai dan perang.⁷ Mereka juga tersebar di daerah-daerah lain di wilayah kekuasaan Umayyah.

Konsep *client* ini menurut Ira M. Lapidus berasal dari warisan budaya Arabia pra-Islam. Seorang *client* sendiri merupakan sekutu inferior dari sebuah klan atau kabilah Arab. Sistem *client* inilah yang diadopsi oleh raja-raja Dinasti Umayyah dalam upaya menegakkan supremasi Arab untuk membedakan mereka dengan muslim non-Arab.⁸

Kiranya gambaran singkat di atas dapat menjelaskan apa dan siapa *mawālī* tersebut. Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ada sejarawan yang mengungkap

⁵ K. Ali, *A Study of Islamic History*, trans. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 190-191

⁶ Montgomery Watt, *the Formative Period of Islamic Thought*, (Edinburg: tnp. 1973), hlm. 45

⁷ RA. Nicholson, *A Literary of the Arab*, (New Delhi: Adam Publisher, 1996), hlm. 219

⁸ Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hlm. 75. Lihat juga Montgomery Watt dan Pierre Cachia, *A History of Islamic Spain*, (edinburg: Edinburg University Press, 1992), hlm. 20. Lebih jauh mengenai inferioritas kaum mawālī ini, lihat di Ali Mufrodi, *Islam di kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 84

secara pasti kapan sebenarnya *mawālī* ini berdiri sebagai sebuah gerakan oposisi sebagai layaknya gerakan-gerakan atau partai-partai pada masa sekarang ini. Namun sebagai catatan, gerakan ini eksis pada masa Dinasti Umayyah dan penamaan *mawālī* sendiri menggambarkan superioritas muslim Arab atas muslim non-Arab. Bentuk inferioritas dan penindasan yang mereka terima akan diulas pada pembahasan berikut.

STATUS SOSIAL

Sebagai warga Negara kelas dua, mereka menerima banyak sekali bentuk penindasan, diskriminasi dan intimidasi. Akumulasi ketidakadilan tersebutlah yang pada gilirannya memicu dan membangkitkan keinginan mereka untuk melawan penguasa.

Di antara ketidakadilan tersebut adalah arogansi, kesombongan dan keangkuhan orang-orang dari muslim Arab. Kedudukan mereka begitu tinggi dalam masyarakat sebagai warga superior. Superioritas mereka tidak hanya ingin diakui oleh sikap dan tindakan; menghormati dan memperlakukan mereka sebagai warga kelas satu, tetapi harus diakui secara material, yaitu tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka (*mawālī*), jika ada, harus lebih kecil dibanding tunjangan yang diberikan kepada orang Arab asli.⁹ Di samping itu, ketika gaji tetap diberikan kepada mereka dalam posisi tertentu, dikenakan juga pajak yang sangat berat.

Perlakuan ketidakadilan dalam hal ekonomi ini merupakan keluhan para *mawālī* yang paling utama.¹⁰ Hal ini tentu sangat wajar mengingat ekonomi merupakan faktor yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Ekonomi yang lemah akibat pembebanan pajak yang berat membuat mereka tidak bisa bergerak maju dalam upaya meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Kesenjangan pun menganga. Kesenjangan sosial dan ketidakmerataan dalam hal ekonomi begitu terasa. Perbedaan antara si kaya dan si miskin begitu nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

0

⁹ Montgomery Watt, *The Majesty...*, hlm. 28; *A History of...*, hlm. 20

¹ Bernard Lewis, *the Arab in History...*, hlm. 71

Yang lebih ironis lagi menurut Marshal G.S. Hodgson dalam bukunya *the Venture of Islam*, adalah status sosial mereka yang disamakan dengan barang rampasan.¹¹ Jadi, di samping dipandang sebagai budak, mereka juga dianggap sebagai barang rampasan yang tentunya bisa dipindahtangankan. Implikasi anggapan seperti ini tentu sangat negatif. Status dan hak mereka sebagai manusia bahkan sebagai muslim untuk dapat hidup sebagaimana mestinya telah dirampas dan direnggut oleh muslim Arab.

Padahal, menurut K. Ali, mereka sebenarnya juga turut berjuang membela Islam, menegakkan dan mengibarkan bendera Umayyah di daerah jajahannya pada masa kejayaannya. Mereka adalah basis infantri yang bertempur berjalan kaki telanjang di atas padang pasir dan gurun yang membakar, tidak di atas unta ataupun kuda. Mereka harus menerima gaji tetap, tanpa tunjangan keluarga dan tunjangan pensiun sebagaimana muslim Arab.¹² Para *mawālī* dengan muslim Arab telah sama-sama mengalami beratnya peperangan-peperangan di perbatasan Timur, terutama Irak.¹³ Dari kenyataan di atas semestinya muslim Arab memperlakukan mereka sebagai manusia yang sama, tidak dipisahkan oleh suku dan keturunan. Juga seharusnya mereka dianggap sebagai satu kesatuan komunitas yang saling membutuhkan satu sama lain.

Perlakuan tidak adil juga merambat pada masalah perkawinan. Perkawinan muslim Arab dengan seorang *mawālī* merupakan hal yang dilarang dan harus dihindari.¹⁴ Apabila sekiranya telah terlanjur terjadi perkawinan seorang *maulā* dengan muslim Arab, maka kedua-duanya harus menerima resiko hukuman dan perkawinan mereka dibubarkan (cerai).¹⁵ Tidak hanya generasi mereka saja yang tidak boleh menikah dengan muslim Arab, tetapi, menurut Ira Lapidus, sampai pada keturunan mereka.¹⁶ Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri. Dalam proses asimilasi dan pembauran antara kedua kelompok tersebut tetap terdapat *gap* atau jurang pemisah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip

2

3

⁴ Marshal Hodgson, *the Venture of Islam: the Classical Age of Islam*, Vol. I, (London: University of Chicago, 1974), hlm. 222. Lihat juga Montgomery Watt, *The Majesty...*, hlm. 28. Ia menambahkan bahwa⁶ status *sosial* para mawali adalah sama sebagai bagian dari jarahan bersamaan dengan direbutnya daerah-daerah taklukan.

¹ K. Ali, *A Study of...*, hlm. 227-228

¹ Montgomery Watt, *The Majesty...*, hlm. 28

¹ K. Ali, *A Study of...*, hlm. 231

¹ E.J. Brill, *First Encyclopedia of...*, hlm. 876

¹ Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hlm. 70; Bernard Lewis, *the Arab in History...*, hlm. 70. Ia memandang perkawinan seorang *mawālī* dengan seorang keturunan muslim Arab sebagai sesuatu yang mengerikan yang akan mendapat sanksi dan hukuman dari raja yang sedang berkuasa.

Islam tentang persamaan dan kesetaraan bahwa manusia tidak dibedakan oleh warna kulit, suku bangsa dan keturunan.

Secara sistematis, hal ini menyebabkan jumlah mereka semakin bertambah dari hari ke hari, komunitas mereka meningkat secara kuantitas, tetapi peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dalam pengertian peningkatan taraf hidup dan perekonomian karena perlakuan tidak adil dari pemerintah.

Perlakuan tidak adil itu tidak hanya dalam urusan sosial kemasyarakatan, tetapi sampai menyentuh pada persoalan *'ubūdiyyah* atau peribadatan. K. Ali mengutip pendapat Sounder yang mengatakan bahwa di Kufah, antara orang-orang muslim Arab dan orang-orang muslim non-Arab masing-masing memiliki masjid sendiri-sendiri.¹⁷ Hal ini disebabkan karena perbedaan status antara mereka dan jarak yang telah dibuat oleh muslim Arab. Perlakuan ini tentu saja sangat menyayat hati para *mawālī*. Mungkin manusia rendah dalam pergaulan kemasyaakatan, tetapi kalau dalam ibadahpun demikian halnya tentu ini sangat keterlaluan. Sebuah sikap yang berlebihan dan menyimpang dari ajaran Islam.

Sebenarnya, meskipun mereka dipandang sebagai masyarakat kelas dua yang bergerak di sektor-sektor pekerjaan berat dan kasar, namun sejarah juga tidak luput mencatat kepandaian, keahlian, ketangkasan dan kecerdasan kaum *mawālī* dalam banyak hal. Tetapi hal ini sangat sedikit –untuk tidak menyebut tidak ada sama sekali—diungkapkan oleh para sejarawan. Mereka turut mengembangkan dan memajukan bidang ilmu pengetahuan. Jasa mereka sangat besar dalam memajukan Islam terutama lewat ilmu pengetahuan, di samping bidang-bidang lain yang menjadi *concern* mereka. Mereka memainkan peranan yang sangat krusial dalam membentuk keyakinan Islam (*Islamic faith*). Demikian juga halnya dalam bidang hukum Islam (*Islamic law*), studi-studi Alquran (*Qur'anic studies*), dan dalam bidang biografi Nabi (*prophet's biography*).¹⁸

Tidak hanya bidang keilmuan yang mereka kuasai, namun dalam hal persajakan (puisi) mereka juga ternyata dikenal sebagai ahlinya sehingga tidak mengherankan apabila pada saat itu banyak lahir penyair-penyair berkelas yang sangat terkemuka.¹⁹ Malahan pada pa-

¹ K. Ali, *A Study of...*, hlm. 231

¹ E.J. Brill, *First Encyclopedia of...*, hlm. 877

¹ *Ibid.* tetapi sayangnya, penulis tidak menemukan penulis yang menyebutkan nama-nama penyair tersebut.

ruh akhir dari pemerintahan Bani Umayyah, para *mawālī* menjadi tenaga pengajar atau tutor bagi putra-putra khalifah. Pada periode yang sama mereka mulai diangkat dan ditunjuk sebagai hakim.

Mereka juga sangat mahir dalam bidang administrasi sehingga banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai administrator. Bahkan beberapa *dīwān*, yang berada di beberapa provinsi di wilayah kekuasaan pemerintahan Bani Umayyah, dipimpin oleh *mawālī*. Di samping bidang ini, di antara mereka ada juga yang ahli di bidang kesekretariatan dan berprofesi sebagai sekretaris (*kātib*).²⁰

Dalam hal kemiliteran, para *mawālī* juga sangat berperan dalam memperkuat barisan kekuatan militer pemerintahan Bani Umayyah. Di samping sebagai anggota militer, banyak juga dari mereka yang diangkat menjadi pemimpin *ḥarrās* (*palace guard*) bagi para khalifah dan para gubernur. Karena ketangkasan mereka dalam bidang kemiliteran ini maka ada yang diangkat menjadi gubernur dan prajurit yang diakui hak-haknya.

Pendeknya, sejak perang sipil kedua, mereka mulai muncul dan eksis dalam masyarakat muslim. Begitu juga dalam percaturan politik, mereka turut memberi warna dalam menyemarakan perpolitikan di masa Bani Umayyah. Keikutsertaan mereka dalam dunia perpolitikan yang paling menonjol menurut M.A. Shaban, adalah yang berpuncak pada masa Marwan II (744- 750 M). Saat itu mereka mengambil peran berskala besar dalam upaya meruntuhkan pemerintahan Bani Umayyah.²¹

Dari uraian di atas dapat kita lihat bagaimana peran yang dimainkan oleh para *mawālī* yang sering dipandang sebagai kelompok masyarakat kelas dua dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Demikian juga dalam bidang sastra dan kemiliteran. Hal terakhir ini sangat jarang diungkapkan oleh para sejarawan ketika menjelaskan tentang *mawālī* sehingga informasi yang sampai kepada kita sering tidak komprehensif. Hal ini telah membentuk anggapan kita selama ini, yang cenderung terlalu miring, yaitu menganggap *mawālī* sebagai kelompok masyarakat yang terbelakang dan kolot, yang bekerja sebagai buruh kasar dan tidak memiliki fungsi dan kedudukan yang urgen dalam struktur masyarakat.

² *Ibid*

² M. A. Shaban, *Islamic History: A new Interpretation*, (New York: Cambirdge, 1991), hlm. 161

GERAKAN MENENTANG TIRANI

Sebagaimana telah penulis paparkan bahwa ternyata perlakuan diskriminatif penguasa terhadap rakyatnya, perlakuan tidak adil, pengebirian hak-hak dan menciptakan berbagai tekanan dalam berbagai hal akan menimbulkan suatu gelombang yang bergerak menggerogoti dalam tubuh sang penguasa. Merupakan fenomena yang sudah umum –dari zaman dahulu hingga sekarang, jika orang yang berada di bawah tekanan dan penindasan dari pihak luar akan melahirkan sikap memberontak, menentang dan paling tidak berusaha melepaskan diri dari penindasan tersebut untuk dapat hidup merdeka, tanpa harus selalu berada di bawah bayang-bayang penguasa tiran dan diskriminatif terhadap rakyatnya.

Keadilan yang diterima oleh kelompok masyarakat kelas dua, *mawālī*, selama bertahun-tahun rupanya juga menimbulkan bibit-bibit permusuhan dan perlawanan. Tanpa disadari oleh penguasa yang hidup dalam kemewahan,²² kebijakan politik pemilahan muslim Arab dengan muslim non-Arab berdampak sangat luas dan mengerikan, yaitu munculnya kekuatan politik baru dengan basis massa yang semakin tidak terbandung yang siap untuk meledak dan memberontak setiap saat. Ibarat lahar panas dalam tubuh sebuah gunung merapi yang siap meledak dan menyembur keluar kapan saja.

Setiap membahas tentang lahirnya kelompok *mawālī*, yang lahir dari tekanan dan ketertindasan, ada satu nama yang selalu terkait dengan kelompok inferior ini. Beliau adalah al-Mukhtār yang, menurut Julius Wellhausen sebagaimana dikutip oleh Montgomery Watt, adalah orang yang berhasil membawa *mawālī* kepada kesadaran total diri mereka sebagai sebuah kekuatan politik.²³ Ia membangkitkan kesadaran politik kelompok *mawālī* dan menggalang kekuatan besar yang terdiri dari orang-orang yang kecewa terhadap penguasa akibat tindakan ketidakadilan mereka. Kekuatan politik baru ini, yang merupakan fenomena² baru dalam dunia perpolitikan Bani Umayyah, sangat dahsyat karena didukung oleh basis massa yang besar.

3

² Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, terj. Frank Rosental Abridged, (New York: Bolligen Foundation, 1967), hlm. 40. Lihat juga Duncan Mcdoonald, *Development of Muslim Theology: Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribnes, 1903), hlm. 88-89; Philip K. Hitty, *History of Arab*, (London: Macmillan, 1970), hlm. 281

² Montgomery Watt, *the Formative...*, hlm. 45

Nama lengkapnya adalah al-Mukhtār ibn Abī ‘Uбайд al-Tsaqāfi. Ia berasal dari Thaif dan merupakan pemimpin pemberontakan Syi’ah di Kufah (685-687 M).²⁴ Jasa terbesarnya terhadap kaum *mawālī* adalah bahwa al-Mukhtār orang pertama yang memberikan hak sebagai seorang muslim kepada kaum *mawālī*. Kedudukan dan status sosial mereka diletakkan sejajar oleh al-Mukhtār dengan muslim Arab.²⁵

Mereka menaruh harapan yang besar terhadap al-Mukhtār karena apa yang mereka inginkan selama ini telah dipenuhinya. Kebebasan dari penindasan dan perlakuan diskriminatif menjadi impian mereka, dan itu mereka dapatkan dari tangan al-Mukhtār. Karena itu sangat wajar apabila mereka mendukung perjuangan al-Mukhtār dalam menggulingkan pemerintahan Dinasti Umayyah. Mereka sangat loyal padanya. Di bawah kepemimpinannya, gerakan *mawālī* ini tidak lagi hanya menentang rezim Bani Umayyah yang berkuasa saat itu. Tetapi lebih dari itu mereka berusaha menentang sistem Arabisme.²⁶

Kekuatan *mawālī* ini, bersama-sama dengan kekuatan oposisi yang lain yakni Bani Abbasiyah dan Syi’ah yang menginginkan keruntuhan pemerintahan Bani Umayyah, mengadakan pemberontakan-pemberontakan sehingga Dinasti Umayyah benar-benar jatuh di bawah Khalifah Marwan II.²⁷

PENUTUP

Mawālī lahir dari ketertindasan dan diskriminasi dari Rezim Umayyah. Mereka muncul sebagai kekuatan politik baru dan sebagai oposisi yang pada akhirnya turut meruntuhkan Dinasti Umayyah. Ini merupakan akibat lebih jauh dari kebijakan politik Bani umayyah di dalam menegakkan supremasi Arab di atas masyarakat muslim non-Arab. Disadari atau tidak, pemilahan dan pemisahan yang tajam dalam hal *sosial*, ekonomi sampai pada peribadatan (ritual) melahirkan suatu fenomena baru dalam dunia percaturan politik rezim

5

6

7

² Montgomery Watt, *The Majesty...*, hlm. 23; Marshal Hodgson, *the Venture of Islam...*, hlm. 222

² RA. Nicholson, *A Literary of the...*, hlm. 219

² K. Ali, *A Study of...*, hlm. 228

² Syed Mahmuddin Nasir, *Islam: Its Concept and History*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), hlm. 181-182. Lihat juga, Akbar S. Ahmad, *Discovering...*, hlm. 40

Umayyah. Supremasi Arab memang dapat ditegakkan, namun gerakan dan kekuatan yang lebih besar di dalam tubuh mereka telah siap meruntuhkan mereka setiap saat.

Penindasan, diskriminasi dan perlakuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua di bawah dominasi muslim Arab yang mereka terima tidak hanya membuat mereka membenci rezim Umayyah tetapi lebih dari itu mereka adalah anti Arab; berusaha menentang sistem Arabisme.

Hal ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi para penguasa yang ingin bercermin pada sejarah peradaban Islam. Penindasan, ketidakadilan, tiran, diskriminasi dan intimidasi akan menciptakan gerakan-gerakan memberontak dari pihak tertindas, terintimidasi dan terdiskriminasi yang bisa saja akan dapat meruntuhkan penguasa itu sendiri. •

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akbar S. (1991). *Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society*, New York: Routledge
- Ali, K. (1997). *A Study of Islamic History*, trans. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Brill, E.J. (1987). *First Encyclopedia of Islam*, Vol. VI, Leiden: E.J. Brill
- Hodgson, Marshal. (1974). *the Venture of Islam: the Classical Age of Islam*, Vol. I, London: University of Chicago, 1974
- Khaldun, Ibn (1967). *al-Muqaddimah*, terj. Frank Rosental Abridged, New York: Bolligen Foundation
- Lapidus, Ira M. (1999). *Sejarah Sosial Umat Islam (A History of Islamic Studies)*, trans. Ghufron A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lewis, Bernard. (1967). *the Arab in History*, New York: Harper&Row
- Mcdonald, Duncan (1903). *Development of Muslim Theology: Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Charles Scribnes
- Mufrodi, Ali (1997). *Islam di kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos
- Nasir, Syed Mahmuddin, (1994). *Islam: Its Concept and History*, New Delhi: Kitab Bhavan
- Nicholson, RA. (1996) *A Literary of the Arab*, New Delhi: Adam Publisher
- Shaban, M. A. (1991). *Islamic History: A new Interpretation*, New York: Cambirdge
- Watt, W. Montgomery. (1994). *the Majesty That was Islam*, London: Sidgwick & Jackson
- _____, (1973). *the Formative Period of Islamic Thought*, Edinburg: tnp.
- _____, dan Pierre Cachia, (1992). *A History of Islamic Spain*, Edinburg: Edinburg University Press